

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai semangat Proklamasi Kemerdekaan, bahwa tujuan Bangsa dan Negara Indonesia merdeka adalah menjadikan masyarakat adil dan makmur, melindungi segenap tanah air dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan masyarakat diantaranya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi.

Visi Pembangunan Jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Terwujudnya Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis, berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari visi ini terlihat ingin diwujudkan selain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman dan damai, juga sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai kesejahteraan harus diupayakan berkembangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan akan terwujud.

Selain mewujudkan kesejahteraan, dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin diwujudkan keadilan dan demokratis. Hal ini berarti juga pembangunan ekonomi yang diupayakan adalah pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Berdasarkan ketetapan MPR XVI tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, maka usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional, yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

1. Misi, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang ke-1 (satu) RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah pedesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. Artinya pembangunan lembaga ekonomi rakyat dalam

rangka pembangunan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan dan pembangunan(reoptimalisasi, revitalisasi dan reaktualisasi) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan.

2. Untuk melaksanakannya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah ditetapkan menjadi satu SKPD berdiri sendiri melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agar Dinas ini mampu melaksanakan visi, strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD melalui tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel, maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disebut Renstra (Rencana Strategis).
3. Renstra ini adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan analisa lingkungan internal dan eksternal (SWOT), melalui penggunaan data dan informasi yang dikumpulkan, masukan-masukan berupa saran dan pendapat berbagai pihak termasuk diskusi-diskusi dengan staf dan masyarakat, serta hasil rapat koordinasi dengan Kepala Dinas dan staf dari kabupaten/kota yang membidangi urusan koperasi dan UMKM. Disamping itu juga masukan saran, pendapat dan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Biro Kepegawaian pada saat dilakukan paparan pra Renstra di lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Proses penyusunan yang dilalui ini tetap konsisten dan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Renstra ini pada dasarnya adalah penjabaran dan pelaksanaan program dari RPJMD. Disamping itu secara teknis juga mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra ini berkaitan dengan alokasi anggaran yang akan disediakan dalam implementasi, yang aturan teknisnya diatur dalam Permendagri 13 dan 59 dimaksud.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah penjabaran visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013 - 2017;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah sebagai pedoman SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2013 - 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan amanah Misi I RPJMD 2012-2017 adalah Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.

Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan wilayah Desa/Kota, dengan penekanan pada agri bahari melalui kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, seimbang, dan demokratis, peningkatan PDRB perkapita masyarakat, serta menunjang Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Konektivitas pembangunan Desa-Kota didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan konsumsi sehingga kemajuan Desa-Kota saling mendukung dan menunjang secara simultan, dan ekonomi desa dapat tumbuh menjadi pusat produksi komoditi yang bernilai tambah sehingga dapat mengatasi penangguran dan kemiskinan.

Perekonomian dikembangkan dan diarahkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha secara adil dan seimbang dalam semua sektor ekonomi serta kesempatan memperoleh akses sumber daya ekonomi produktif seperti lahan, wilayah tempat usaha, permodalan dan teknologi secara seimbang, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan keterkaitannya dan sinergitas kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2008 sebagai berikut:

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya..

Fungsi :

1. Pengelolaan kegiatan ketatausahaan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang koperasi;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran;
6. Pelaksanaan penetapan pengesahan badan hukum koperasi, pengesahan anggaran dasar koperasi dan penyelesaian pembubaran koperasi bagi koperasi primer dan skunder lintas kabupaten/kota;
7. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pelayanan administrasi umum, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembinaan kepegawaian pada satuan kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Fungsi :

1. Pembantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
2. Penyiapan data, informasi dan mengolahnya guna perumusan dan kebijakan teknis di bidang sekretariat;
3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring dan pelaporan program kerja tahunan Dinas, termasuk mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian Program Kerja pada Sekretariat;
4. Pemimpin dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan Staf yang berada dibawah Sekretariat;

5. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
7. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan meliputi urusan anggaran, pembukuan dan perbendaharaan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporan;
8. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
9. Pelaksanaan urusan umum;
10. Pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
11. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, promosi, mutasi, pensiun dan lain-lain;
12. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas menyangkut bidang tugasnya, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Subbag Penyusunan Perencanaan

Tugas : melaksanakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Dinas.

B. Subbag Umum dan Kepegawaian

Tugas : Melaksanakan urusan surat-menyurat, dokumen dan perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, umum dan protokol, hubungan masyarakat dan kepegawaian.

C. Subbag Keuangan

Tugas : melaksanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja dan kegiatan, urusan pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta urusan perbendaharaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BIDANG KOPERASI

Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan regulasi tentang perkoperasian meliputi kelembagaan, permodalan, usaha dan manajemen.

A. Seksi Bina Usaha Koperasi

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan dan manajemen koperasi.

B. Seksi Pengawasan

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, konsultasi dan fasilitasi pengawasan dan penilaian terhadap koperasi.

C. Seksi Pengawasan

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, konsultasi dan fasilitasi pengawasan dan penilaian terhadap koperasi.

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan regulasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

A. Seksi Industri Pertanian

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pengembangan usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang industri pertanian.

B. Seksi Industri Non Pertanian

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, melakukan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pengembangan usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang industri non pertanian.

C. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan, konsultasi, fasilitasi dan pengawasan pengembangan usaha, manajemen, permodalan dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang perdagangan dan aneka usaha.

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PROMOSI KUMKM

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian fasilitas pembiayaan promosi koperasi KUMKM.

A. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan

Tugas: pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi serta pengawasan permodalan dan jasa keuangan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Seksi Promosi dan Pemasaran

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi pemasaran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2012 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 53 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 41 orang PNS. Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 berjumlah 12 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 25 orang, D3 sebanyak 5 orang, SMU sebanyak 7 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	2	2	4
3	Sarjana / S1	14	11	25
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	2	3	5
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	6	1	7
JUMLAH		24	17	41

Tabel 2.2
 Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Berdasarkan Eseloning

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	3	1	4
3	IV	8	3	11
4	Non Eselon	12	13	25
	JUMLAH	24	17	41

2.3 Kekuatan, Kelemahan, tantangan dan Peluang

2.3.1 Identifikasi faktor Internal (kekuatan dan kelemahan)

Untuk tercapainya Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Ekternal dianalisis melalui analisis SWOT.

Identifikasi faktor Internal dilakukan dengan teknik *brainstorming* (Alex Osbon) yaitu mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Hasil *brainstorming* dikelompokkan kedalam kategori *strenghts* (kekuatan) dan *weaknessses* (kelemahan)

Dari hasil analisis SWOT dengan teknik *brainstorming* ,faktor kekuatan (*strenghts*) sebagai berikut:

1. Adanya Perda No 6 tahun 2008
2. Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang
4. Tersedianya sumber daya alam yang potensial
5. Terjalinnnya kerjasama antar Kabupaten/Kota
6. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.

Dari uraian kekuatan diatas, terdapat juga kelemahan yang harus diantisipasi sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data valid dan akurat

2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
3. Belum tersedianya Gedung Balatkop dan Pusat Promosi KUMKM
4. Sebagian besar UMKM bersifat non formal dan berskala Mikro, Diversifikasi produknya masih terbatas.
5. Potensi sumber daya di Provinsi Bangka Belitung belum Dimanfaatkan secara optimal oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1 Identifikasi faktor Eksternal (peluang dan tantangan)

Identifikasi faktor eksternal adalah merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi merupakan input bagi organisasi berupa lingkungan, dukungan, harapan, keinginan dan yang memberikan manfaat besar dikemudian hari di kategorikan sebagai peluang (Opportunities).

Adapun peluang-peluang yang dapat diidentifikasi melalui teknik *brainstorming* untuk mencapai visi dan misi sebagai berikut :

1. Pasar dalam dan luar negeri terbuka bagi produk Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
3. Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Strategis.
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Destinasi wisata Nasional.
5. Mayoritas Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sedangkan tantangan (treats) yang dapat menghalangi pencapaian Visi dan Misi yang harus diantisipasi sebagai berikut:

1. Persaingan yang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UMKM) Dan Koperasi.
2. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi Standar mutu baik Nasional maupun Internasional.
3. Kondisi ekonomi yang fluktuatif
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
5. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Belum terkelolanya data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah *“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”*.

Setidaknya ada enam makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Mandiri* menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Berkeadilan* adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat

pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.

5. *Sinergitas* dan *konektivitas* dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. *Daya saing* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif

melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government* melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

Tabel 3.1

Visi : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan				
1	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan	Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran	Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses permodalan kepada masyarakat, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran,	Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya. Perluasan aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat.

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	<p>budaya daerah</p> <p>Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung</p>	<p>Meningkatnya daya beli masyarakat</p> <p>pengangguran</p> <p>Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.</p>	<p>melaksanakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.</p> <p>Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil.</p>	<p>Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.</p> <p>Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama perdagangan</p> <p>Pengembangan promosi produk - produk unggulan daerah</p> <p>Pengembangan program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung.</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM</p> <p>Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah</p>

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

a. Faktor-faktor Penghambat

1. Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara *up to date*
 2. Kurangnya sinergitas antar SKPD serta *stakeholder* lain
 3. Belum terdatanya PKL secara baik
- b. Faktor-faktor Pendorong
1. Adanya komitmen pengembangan KUMKM oleh pemerintah
 2. Perkembangan KUMKM yang cenderung meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra kabupaten.

Berikut adalah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian :

1. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitas ekspor;
2. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri;
3. Peningkatan daya saing ekspor;
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional;
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
8. Lembaga Pengelola Dana Bergutir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUKM);
9. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota);
11. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor-faktor penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten/kota antara lain adalah:

1. Terbatasnya anggaran kementerian untuk mengakomodir pengembangan KUMKM yang tidak terfasilitasi oleh anggaran Pemerintah Provinsi;
2. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait;
3. Perbedaan tingkat perkembangan bidang usaha pada setiap daerah;
4. Program dan kegiatan yang dapat saling mengisi dengan pendanaan APBN dan APBD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sampai saat ini belum teridentifikasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi sementara sektor pertambangan memiliki keterbatasan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sektor pertanian memiliki keterbatasan ketersediaan lahan, maka mutlak diperlukan adanya perubahan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bidang usaha perdagangan dan perindustrian, dalam hal ini koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai alternatif bagi peningkatan perekonomian rakyat. Pengembangan bidang usaha ini harus memperhatikan peluang atau potensi daerah, dan harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Potensi lainnya berupa pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang relatif bertambah setiap tahunnya namun belum

tertangani secara optimal. Terutama sektor informal. Sektor informal merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Terkait hal tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi;
2. Terbatasnya jaringan usaha, lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan bagi KUMKM;
3. Belum optimalnya kemampuan desain dan *packaging*.;
4. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM;
5. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yg dilakukan kurang maksimal;
6. Terbatasnya calon eksportir serta promosi/misi dagang ke luar negeri;
7. Organisasi PKL belum terorganisir secara formal;

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,, antara lain :

1. Ketahanan pangan dan ekonomi rakyat di tengah persoalan ekonomi global.

Akhir-akhir ini harga bahan pangan menjadi naik cukup tinggi serta terjadi kelangkaan di banyak negara. Khususnya di negara- negara berkembang, bahkan menimbulkan aksi protes masyarakat kepada pemerintah. Pelaku produksi bahan pangan umumnya adalah usaha mikro, kecil dan menengah serta anggota-anggota koperasi. Oleh karena itu pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan di pedesaan maupun di perkotaan menjadi strategis. Karena kelangkaan bahan pangan (akibat produksi turun atau rendah),dapat dijadikan alat intervensi/campur tangan oleh negara pengekspor pangan terhadap pengimpor pangan. Dengan demikian ketahanan pangan sangat vital dan strategis, serta penting untuk dijaga dan ditingkatkan, sehingga keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memproduksi pangan dan bahan pangan (seperti petani, nelayan, perkebunan, peternak dan lain-lain) sangat penting dibina, dikembangkan dan diberdayakan.

2. Ketahanan ekonomi rakyat pedesaan dan perkotaan

Pertumbuhan ekonomi saat ini diperkirakan akan menurun, di antaranya sebagai dampak kenaikan harga BBM dan pangan, sementara itu daya beli masyarakat akan menurun secara riil karena terjadinya inflasi.

Perekonomian di pedesaan maupun perkotaan sebagian besar dilakukan dan digerakkan oleh pelaku usaha yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil, sedikit saja oleh pelaku usaha menengah dan besar. Secara Nasional usaha mikro dan kecil berjumlah 99,77% dari total pelaku usaha, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 99,31%. Kondisi ini mengharuskan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi baik di pedesaan maupun di perkotaan menjadi perhatian penting. Daya tahan ekonomi rakyat sangat ditentukan oleh keberadaan usaha-usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Apabila tidak dibina, diberdayakan dan dikembangkan, maka secara fundamental ketahanan ekonomi rakyat di pedesaan dan perkotaan akan rapuh. Kalau ini terjadi dapat berakibat kepada munculnya kerawanan-kerawanan sosial dan dapat berdampak pada politik dan keamanan seperti bertambahnya pengangguran, penduduk yang miskin bertambah serta munculnya kelaparan yang dapat mengancam keamanan dan kedamaian di satu wilayah.

3. Tingginya peran usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam penciptaan PDRB dan penyerapan tenaga kerja

Tahun 2005, peran UMKM dan koperasi dalam PDRB mencapai 53,4%, dan meningkat di tahun 2006 menjadi 54,1% dan menyerap tenaga kerja 96,28% di tahun 2005 dan 96,19% di tahun 2006 (secara nasional). Khusus di Provinsi kepulauan Bangka Belitung berperan dalam PDRB 56,5% tahun 2005 dan 61,55% tahun 2006, serta menyerap tenaga kerja 97,36% tahun 2005 dan 98,62% tahun 2006.

Peran yang besar ini, tentunya besar juga pengaruhnya dalam menyangga ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau dilihat dari struktur dunia usaha, maka jumlah usaha kecil dari keseluruhan (usaha mikro, kecil, menengah dan besar) mencapai 99,78% di tahun 2005 dan 99,77% di tahun 2006 secara nasional. Dan khusus untuk Bangka Belitung dari total jumlah usaha (usaha mikro, kecil, menengah dan besar) 231.988 unit, ternyata usaha mikro dan usaha kecil mencapai 99,64%.

Hal ini berarti potensi dan posisi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian dan tata perekonomian sangat strategis dan penting. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan, bahwa

pembangunan ekonomi yang lebih menguntungkan pelaku ekonomi skala besar ditengarai telah gagal membawa perekonomian menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sekejap krisis ekonomi telah memporak-porandakan sendi-sendi fundamental ketahanan ekonomi. Justru ditengah hantaman krisis ekonomi inilah terlihat bahwa ternyata usaha kecil dan menengah serta koperasi (yang sebagian besar anggotanya UKM) mampu bertahan dan menopang ketahanan ekonomi sampai saat ini.

4. Realisasi penyaluran kredit untuk memperkuat modal koperasi dan UMKM, sebesar 20 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan. Meskipun UMKM dan koperasi menduduki potensi, posisi dan peran yang penting serta strategis dalam perekonomian dan tatanan perekonomian Indonesia, ternyata dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha, adakalanya mereka kesulitan dalam hal memenuhi modal usaha, baik untuk modal kerja maupun investasi. Oleh karena itu adanya kebijakan Bank Indonesia, agar setiap Bank Umum, terutama Bank Umum milik pemerintah menyalurkan kredit minimal 20% untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam menggerakkan sektor riil adalah tepat. Tetapi di dalam kenyataannya, realisasinya masih belum mencapai sebesar hal itu, terutama akibat agunan usaha mikro, kecil dan menengah yang terbatas. Tentu kehadiran pola kredit untuk usaha rakyat (KUR) seperti saat ini, merupakan peluang baru untuk memperoleh modal, karena agunan tidak menjadi persyaratan utama sampai batasan besaran tertentu. Adanya program penjaminan dari lembaga keuangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sangat membantu. Sebagai contoh usaha mikro dan kecil untuk jenis industri rumah tangga, permodalannya 90,4% dibiayai modal sendiri, dan untuk industri kecil 69,8% modalnya berasal dari modal sendiri.

5. Regulasi dan deregulasi dari pemerintah maupun lembaga keuangan dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Pemerintah dan lembaga keuangan dalam penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan dalam aspek kehidupan ekonomi, seyogianya menciptakan iklim yang memberikan pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Tanpa itu maka sulit bagi KUMKM berkembang maju, mandiri apalagi tangguh untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Sebagai contoh pencadangan

lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan usaha non formal lainnya di setiap kota di berbagai daerah.

Iklim yang kondusif dalam bentuk pengaturan sangat dibutuhkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah baik dibidang produksi, pemasaran, permodalan, teknologi, kepastian tempat berusaha, SDM dan lain-lain.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perubahan yang terjadi begitu pesat dan tanpa dapat diprediksi, baik secara internal maupun eksternal, di antaranya globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, otonomi daerah, perubahan iklim global, demokratisasi dan lain-lain.

Kondisi ini harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perubahan itu. Oleh karena itu agar tetap dapat eksis dan berkembang dalam menjalankan tupoksinya secara efisien dan efektif berupa kerja, karya, dan kinerja, maka perlu digunakan manajemen strategis dalam bekerja sebagai organisasi.

Manajemen strategis merupakan suatu konsep yang menggunakan pendekatan antisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan organisasi, dengan memperhatikan perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui salah satu analisa, yaitu analisa SWOT.

Manajemen strategis menghasilkan salah satu konsep yang disebut Renstra. Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan selama 5 tahun. Dengan mempedomani konsep/teori/pola renstra ini beserta RPJMD, dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka melalui proses diskusi dengan staf, masukan dan arahan dari Gubernur, serta masukan dari masyarakat maupun LSM maka ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan sebagai berikut :

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 VISI

Menindaklanjuti "DRAFT" Visi & Misi RPJP Pemerintah Provinsi, serta memperhatikan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM,serta perkembangan lingkungan strategis dan antisipasi perubahan dalam 5 tahun kedepan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

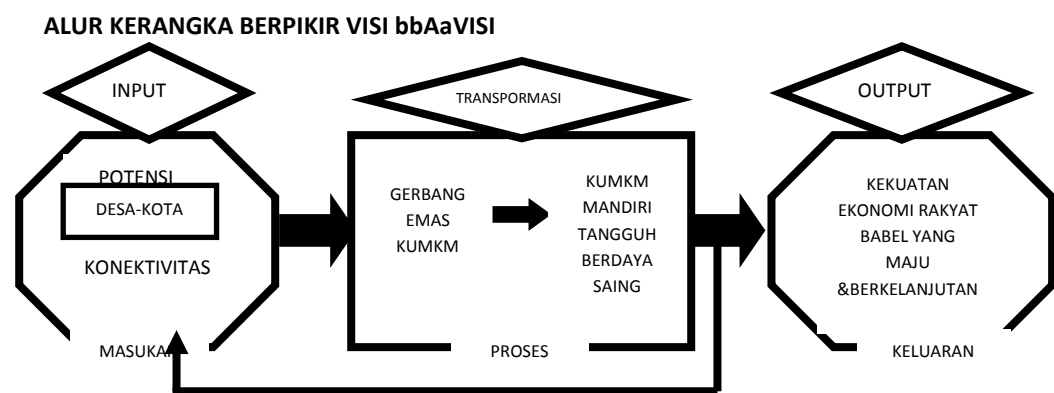
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KEKUATAN EKONOMI RAKYAT BANGKA BELITUNG YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN MELALUI GERBANG EMAS KUMKM YANG MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING BERBASIS POTENSI DAN KONEKTIVITAS DESA-KOTA ”

Pengertian dan makna VISI :

”Kekuatan ekonomi adalah ukuran kemampuan financial/ pendapatan (daya beli) seseorang/ masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan dasar, pencapaian cita-citan dan kemajuannya

Artinya kalau pendapatan/ kondisi keuangan meningkat dan mampu secara terus-menerus (dalam jangka panjang) meningkat dari masa ke masa, serta mampu membiayai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, dalam berbagai keadaan, maka kekuatan ekonomi dapat disebut maju dan berkelanjutan.”



- **Rakyat Bangka Belitung** adalah seluruh penduduk (masyarakat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- **Maju** artinya terjadi perbaikan ke arah peningkatan secara terus menerus dalam berbagai situasi, dibanding periode sebelumnya.
- **Berkelanjutan** artinya tidak terputus, karena kebutuhan manusia/ masyarakat pemenuhannya juga tidak pernah berhenti. Jadi berlanjut terus.
- **Melalui** artinya dengan cara/ metode atau pendekatan atau program dan kegiatan.
- **Gerbang Emas KUMKM** adalah singkatan dari Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Artinya sebuah gerakan adalah upaya yang massif dilakukan oleh seluruh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha secara bersama-sama bahu-membahu. Pembangunan artinya adalah upaya perbaikan dan pengembangan ke arah peningkatan yang lebih baik dari yang sebelumnya atau lebih maju. Sedangkan Ekonomi masyarakat

KUMKM artinya adalah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- **Mandiri** artinya mengambil keputusan dan tindakan segala sesuatunya berdasarkan pertimbangan dan kemampuan sendiri.
- **Tangguh** artinya dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi, dan tidak pernah berhenti minimal berturut-turut tanpa terputus selama 5-10 tahun.
- **Berdaya Saing** artinya punya kemampuan berkompetisi dengan lingkungan bisnis yang ada, termasuk dengan produk yang dihasilkan oleh para pesaing dalam pasar, dengan keunggulan dan kualitas tertentu.
- **Berbasis Potensi Desa-Kota** artinya mendasarkan pengembangan usaha atas potensi ekonomi yang ada dan unggulan di desa dan di kota yang ada, dalam wilayah lokal (setempat). Artinya mengutamakan pengembangan usaha atas dasar potensi SDA lokal.
- **Berbasis Konektivitas Desa-Kota** artinya bahwa pembanguna potensi desa-kota itu dilakukan melalui saling keterkaitan, saling mendukung dan saling memajukan, sehingga terjadi hasil sinergitas potensi desa-kota, yang menghasilkan kekuatan yang besar dalam suatu wilayah setempat. Kemajuan ekonomi pedesaan bersamaan dengan kemampuan ekonomi perkotaan.

4.1.2 MISI

Misi adalah surat jalan atau protes kerja mencapai Visi, sehingga menjadi dasar penetapan program dan kegiatan SKPD yang akan dikerjakan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Visi tersebut, dirumuskan dan ditetapkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai tupoksinya sebagai berikut:

1. Mengembangkan KUMKM untuk mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal menjadi potensi riil (pro environment)
2. Meningkatkan peran KUMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (pro growth)
3. Meningkatkan peran KUMKM dalam menciptakan dan menyerap tenaga kerja (pro job)
4. Meningkatkan peran KUMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan penduduk (pro poor)
5. Mengembangkan lembaga Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan utama (fondasi) ekonomi rakyat babel)

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2.1 TUJUAN

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga dan produk kumkm
2. Peningkatan kekuatan modal kumkm dan volume usaha
3. Meningkatkan peran kumkm mengembangkan ekonomi daerah melalui potensi wilayah (ovop)
4. Meningkatkan konektivitas dan sinergitas pemberdayaan kumkm dengan pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota), swasta, bumh dan masyarakat
5. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat
6. Meningkatkan jumlah dan kualitas sdm aparatur maupun sdm kumkm
7. Membangun infrastruktur balai latihan kumkm dan pusat promosi/ bisnis kumkm dan kantor dinas kumkm serta kualitas data base

4.2.2 SASARAN

1. Sasaran tujuan Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga produk KUMKM
 - a. Bertambahnya Koperasi 105 Unit (Perdesaan 70 Unit Dan Perkotaan 35 Unit); Dan 17.500 Unit UMKM
 - b. Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas 166 Unit (Sehat 75 Kop, Kelas A 25 Kop Dan Kelas B 31 Kop, Mandiri 25 Kop Dan Tangguh 10 Kop)
 - c. Bertambahnya 5 Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional;
 - d. Pelaksanaan Rat Koperasi Minimal 60%;
 - e. Bertambahnya Koperasi Skala Besar Sebanyak 3 Unit;
 - f. Koperasi Aktif Minimal 87% Dari Seluruh Koperasi;
 - g. Bertambahnya Ragam Kemasan Kumkm Sebanyak 9 Jenis Kemasan;
 - h. Diterbitkannya 50 Sertifikat Halal Untuk Umkm;

- i. Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Sebanyak 1260 Unit;
 - j. Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sebanyak 40 Unit Usaha;
 - k. Terpilihnya 5 UMKM Berprestasi Nasional;
2. Sasaran Tujuan Peningkatan Kekuatan Modal KUMKM dan Volume Usaha
 - a. Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi Sebesar Rp. 70 Milyar;
 - b. Tersalurkannya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM Menjadi 57% Ditahun Kelima Dari Total Kredit Yang Disalurkan;
 - c. PT. Jamkrida Babel Menjamin KUMKM Sebanyak 850 Unit;
 - d. Tersalurnya Rp. 2,7 Trilyun Kredit Perbankan Kepada Kumkm, Dana Bumh/Csr Rp. 26 Milyar, Dana Bantuan Hibah Pemerintah Rp. 80 Milyar, Tersalurnya Dana LPDB Sebesar Rp. 2 Milyar
 - e. Bertambahnya Volume Usaha Koperasi Sebesar Rp. 700 Milyar;
 - f. Bertambahnya Volume Usaha UMKM Sebesar Rp. 10 Trilyun .
 3. Sasaran Tujuan Meningkatkan Peran KUMKM Mengembangkan Ekonomi Daerah Melalui Potensi Wilayah (OVOP)
 - a. Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh Koperasi 1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang
 - b. Pembangunan Pasar Tradisional Sebanyak 21 Unit Yang Tersebar Di 7 Kab/Kota;
 - c. Terwujudnya 125 Kumkm Yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau;
 - d. Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan 10%, Perkebunan 20%, Pariwisata 5%, Perdagangan 30%, Pangan 25%.
 4. Sasaran Tujuan Meningkatkan Konektivitas Dan Sinergitas Pemberdayaan KUMKM Dengan Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota), Swasta, BUMN serta Masyarakat
 - a. Terlaksananya 30 Kali Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, 20 Kali Dengan Instansi Provinsi, 20 Kali Dengan Dinas Kab/Kota Dan 50 Kali Dengan Lintas Lembaga;
 - b. Terwujudnya Koordinasi Dan Kerjasama Dengan 6 (Enam) Lembaga Perbankan, 1 (Satu) Lembaga Penjaminan Kredit, 14 (Empat Belas) BUMN;
 - c. Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum Sebanyak 15 Kali;

- d. Terwujudnya 7 Tim Koordinasi Dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif Di 7 Kab/Kota
5. Sasaran Tujuan Meningkatkan Pengawasan Terhadap Praktek Berkoperasi Di Tengah Masyarakat
 - a. Terbentuknya 8 (Delapan) Tim Pengawasan Koperasi, 1 (Satu) Pokja Pengawasan Koperasi
6. Sasaran Tujuan Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas SDM Aparatur Maupun SDM KUMKM
 - a. Bertambahnya SDM Pembina 60 Pegawai
 - b. Terlatihnya SDM Pembina 60 Orang
 - c. Bertambahnya SDM Koperasi 1.000 Orang Dan SDM KUMKM 17.500 Orang
 - d. Terlatihnya SDM Koperasi 2.000 Orang Dan SDM KUMKM 1.250 Orang
7. Sasaran Tujuan Membangun Infrastruktur Balai Latihan KUMKM Dan Pusat Promosi/ Bisnis KUMKM Dan Kantor Dinas KUMKM Serta Kualitas Data Base
 - a. Terwujudnya 8 Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi Dan UMKM
 - b. Bertambahnya Penyuluh Dan Pencacah Data Koperasi Dan UMKM Sejumlah 25 Orang
 - c. Terwujudnya Pembangunan 1 Unit Kantor Dinas, 1 Unit Balatkop Dan UMKM Serta 1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN:

1. Percepatan pembangunan dan memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan dengan pendekatan lintas sector, lintas wilayah dan lintas lembaga.
2. Mendayagunakan rapat dan hasil koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan antar SKPD Provinsi, dengan Pemerintah Pusat/ KL dan dengan Pemerintah dan SKPD Kabupaten/ Kota.
3. Memperkuat kerja sama antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam gerakan percepatan kemajuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi fondasi ekonomi rakyat Bangka Belitung.

4. Mengembangkan demokratisasi ekonomi dan pemerataan pendapatan yang berkeadilan melalui peningkatan peran KUMKM dalam perekonomian dan tata perekonomian.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan pola reoptimalisasi, revitalisasi dan reaktualisasi, sinergitas dan konektivitas.
6. Wawasan pemberdayaan dan pembangunan KUMKM dilakukan dengan pola pikir yang berwawasan geo strategis, geo economic, geo politik dan geo sosial budaya.
7. Menjadikan Dinas Koperasi yang memberdayakan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kota sebagai kekuatan utama pembinaan pada KUMKM.
8. Potensi ekonomi lokal wilayah pedesaan dan perkotaan akan dijadikan kekuatan sumber daya utama dalam pengembangan usaha KUMKM.
9. Gerakan kewirausahaan dijadikan pemicu KUMKM dan pemacu utama kemajuan dan daya saing ekonomi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan implemerencana dan terarah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 13 program. Penetapan program ini disesuaikan dengan Permendagri 13 dan 59 serta Program Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta mengakomodir program dan kegiatan Pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

Secara terinci program dan kegiatan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.15.01.01						

Kegiatan :									
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.15.01.01.01	—	√	√	√	√	√	√
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.15.01.01.02	—	√	√	√	√	√	√
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.15.01.01.03	—	√	√	√	√	√	√
1.4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1.15.01.01.04	—	√	√	√	√	√	√
1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	1.15.01.01.05	—	√	√	√	√	√	√
1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Ooperasional Penyediaan Jasa Jaminan	1.15.01.01.06	—	√	√	√	√	√	√
1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.15.01.01.07	—	√	√	√	√	√	√
1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	1.15.01.01.08	—	√	√	√	√	√	√
1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	1.15.01.01.09	—	√	√	√	√	√	√
1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.15.01.01.10	—	√	√	√	√	√	√
1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.15.01.01.11	—	√	√	√	√	√	√
1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.15.01.01.12	—	√	√	√	√	√	√
1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.15.01.01.13	—	√	√	√	√	√	√
1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.15.01.01.14	—	√	√	√	√	√	√
1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1.15.01.01.15	—	√	√	√	√	√	√
1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.15.01.01.16	—	√	√	√	√	√	√
1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.15.01.01.17	—	√	√	√	√	√	√

1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.15.01.01.18	—	√	√	√	√	√
1.19	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	1.15.01.01.19	—	√	√	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.15.01.02						
Kegiatan :								
2.1	Pembangunan Rumah jabatan	1.15.01.02.01	—	—	—	—	—	—
2.2	Pembangunan Rumah Dinas	1.15.01.02.02	—	√	—	—	—	—
2.3	Pembangunan Gedung Kantor	1.15.01.02.03	—	—	—	—	√	√
2.4	Pengadaan Mobil jabatan	1.15.01.02.04	—	√	—	—	—	—
2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.15.01.02.05	—	√	√	√	√	√
2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.15.01.02.06	—	—	√	√	√	√
2.7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1.15.01.02.07	—	√	√	√	√	√
2.8	Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	1.15.01.02.08	—	—	√	√	√	√
2.9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	1.15.01.02.09	—	√	√	√	√	√
2.10	Pengadaan Meubeleur	1.15.01.02.10	—	√	√	√	√	√
2.11	Pengadaan s/d dan seterusnya	1.15.01.02.11	—	—	—	√	√	√
2.20	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan	1.15.01.02.20	—	—	—	√	√	√
2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	1.15.01.02.21	—	—	—	√	√	√
2.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	1.15.01.02.22	—	—	—	√	√	√

2.23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	1.15.01.02.23	-	-	-	√	√	√
2.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.15.01.02.24	-	√	√	√	√	√
2.25	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas	1.15.01.02.25	-	√	√	√	√	√
2.26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.15.01.02.26	-	√	√	√	√	√
2.27	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan /dinas	1.15.01.02.27	-	-	-	-	√	√
2.28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.15.01.02.28	-	√	√	√	√	√
2.29	Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler	1.15.01.02.29	-	-	-	-	√	√
2.30	Pemeliharaan Rutin/berkala dan seterusnya	1.15.01.02.30 - 39	-	-	-	-	√	√
2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1.15.01.02.40	-	-	-	-	√	√
2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1.15.01.02.41	-	-	-	-	√	√
2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.15.01.02.42	-	-	-	-	√	√
2.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	1.15.01.02.43	-	-	-	-	√	√
2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan operasional / dinas	1.15.01.02.44	-	-	-	-	√	√
2.45	Dst.....	1.15.01.02.45	-	-	-	-	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.15.01.03						
Kegiatan :								
3.1	Pengadaan mesin	1.15.01.03.	-	√	-	-	-	-

	kartu/absensi	01						
3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.15.01.03.02	-	-	-	√	√	√
3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1.15.01.03.03	-	-	-	√	√	√
3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	1.15.01.03.04	-	-	-	√	√	√
3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1.15.01.03.05	-	-	-	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	1.15.01.04						
Kegiatan :								
4.1	Pemulangan pegawai yang pensiun	1.15.01.04.01	-	-	-	-	-	-
4.2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	1.15.01.04.02	-	-	-	√	√	√
4.3	Pemindahan tugas PNS	1.15.01.04.03	-	-	-	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.15.01.05						
Kegiatan :								
5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	1.15.01.05.01	-	-	-	√	√	√
5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.15.01.05.02	-	-	-	√	√	√
5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.15.01.05.03	-	-	-	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode	Dilaksanakan Tahun					
-----	-----------------------	------	--------------------	--	--	--	--	--

		Program / Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.15.01.06						
Kegiatan :								
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1.15.01.06.01	—	—	—	√	√	√
6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.15.01.06.02	—	—	—	√	√	√
6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.15.01.06.03	—	—	—	√	√	√
6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.15.01.06.04	—	—	—	√	√	√
6.5	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1.15.01.06.04	—	—	√	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang kondusif	1.15.01.15						
Kegiatan :								
7.1	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	1.15.01.15.01	—	—	—	√	√	√
7.2	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	1.15.01.15.02	—	—	—	√	√	√
7.3	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah	1.15.01.15.03	—	—	—	√	√	√
7.4	Pendirian unit penanganan pengaduan	1.15.01.15.04	—	—	—	√	√	√
7.5	Pengkajian dampak regulasi / kebijakan nasional	1.15.01.15.05	—	—	—	√	√	√
7.6	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah	1.15.01.15.06	—	—	√	√	√	√

7.7	Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	1.15.01.15.07	-	-	-	√	√	√
7.8	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	1.15.01.15.08	-	-	-	√	√	√
7.9	Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah	1.15.01.15.09	-	-	-	√	√	√
7.10	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah	1.15.01.15.10	-	-	-	√	√	√
7.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.15.01.15.11	-	√	√	√	√	√
7.12	Pelatihan prosedur perizinan	1.15.01.15.12	-	-	-	√	√	√
7.13	Dst....	1.15.01.15.13	-	-	-	√	√	√
7.14	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1.15.01.15.14	-	√	-	-	-	-
7.15	Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Nasional	1.15.01.15.15	-	√	-	-	-	-
7.16	Pengembangan Klaster Bisnis	1.15.01.15.16	-	√	-	-	-	-
7.17	Forum Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep. Babel	1.15.01.15.17	-	√	-	-	-	-
7.18	Pembentukan Forum Kemitraan Antar UMKM dengan Usaha Besar di Prov. Kep. Babel	1.15.01.15.18	-	√	-	-	-	-

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	1.15.01.16						
Kegiatan :								
8.1	Fasilitasi pengembangan	1.15.01.16.	√	-	√	√	√	√

	inkubator teknologi dan bisnis	01						
8.2	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing	1.15.01.16.02	-	-	-	√	√	√
8.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	1.15.01.16.03	-	-	-	√	√	√
8.4	Peningkatan kerjasama dibidang HAKI	1.15.01.16.04	-	-	-	√	√	√
8.5	Fasilitasi pengembangan sarana promosihasil produksi	1.15.01.16.05	-	-	-	√	√	√
8.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	1.15.01.16.06	√	-	√	√	√	√
8.7	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	1.15.01.16.07	-	-	-	√	√	√
8.8	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil dan menengah	1.15.01.16.08	-	-	-	√	√	√
8.9	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro, kecil dan menengah	1.15.01.16.09	-	-	-	√	√	√
8.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.15.01.16.10	-	-	-	√	√	√
8.11	Pelatihan kader koperasi	1.15.01.16.11	-	-	√	√	√	√
8.12	Pelatihan dasar akuntansi koperasi	1.15.01.16.12	√	√	√	√	√	√
8.13	Diklat AMT	1.15.01.16.13	-	-	-	√	√	√
8.14	Penilaian dan penghargaan bagi UMKM berprestasi TK Provinsi	1.15.01.16.14	-	-	√	-	-	-
8.15	Forum Lembaga Pengembangan kewirausahaan	1.15.01.16.15	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggara Pelatihan Teknik Desain Kemasan	1.15.01.16.16	√	-	-	-	-	-

8.16								
8.17	Pelatihan dan Pendamping Inovasi/ Ide Ddesain Kemasan Produk	1.15.01.16.17	-	√	-	-	-	-

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.15.01.17						
Kegiatan :								
9.1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1.15.01.17.01	√	√	√	√	√	√
9.2	Pengembangan klaster bisnis	1.15.01.17.02	√	√	√	√	√	√
9.3	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	1.15.01.17.03	√	√	√	√	√	√
9.4	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	1.15.01.17.04	√	√	√	√	√	√
9.5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	1.15.01.17.05	√	√	√	√	√	√
9.6	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1.15.01.17.06	√	√	√	√	√	√
9.7	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	1.15.01.17.07	√	√	√	√	√	√
9.8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	1.15.01.17.08	√	√	√	√	√	√
9.9	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	1.15.01.17.09	√	√	√	√	√	√
9.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	1.15.01.17.10	√	√	√	√	√	√

9.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.15.01.17.11	√	√	√	√	√	√
9.12	Bimtek dan Fasilitasi Kemitraan Antara UMKM dan UB	1.15.01.17.12	-	-	√	-	-	-
9.13	Pembentukan Lembaga Pengembangan Wirausaha	1.15.01.17.13	-	-	√	-	-	-
9.14	Belitung Expo	1.15.01.17.14	-	√	-	-	-	-
9.15	Pameran Produk Unggulan (PPUD)	1.15.01.17.15	-	√	-	-	-	-
9.16	Pekan Raya Jakarta (PRJ)	1.15.01.17.16	-	√	√	-	-	-
9.17	SUMEX	1.15.01.17.17	-	√	√	-	-	-
9.18	INACRAF	1.15.01.17.18	-	√	√	-	-	-
9.19	AGRINEX	1.15.01.17.19	-	√	-	-	-	-
9.20	Pameran Produk Unggulan Indonesia	1.15.01.17.20	-	-	√	-	-	-
9.21	Pameran Bandung Indagkop dan UMKM Expo	1.15.01.17.21	-	-	√	-	-	-
9.22	JOGJA TIT	1.15.01.17.22	-	-	√	-	-	-
9.23	BELITUNG FAIR	1.15.01.17.23	-	-	√	-	-	-
9.24	Promosi Luar Negeri	1.15.01.17.24	-	-	√	-	-	-

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1.15.01.18						
Kegiatan :								
10.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	1.15.01.18.01	√	√	√	√	√	√

10.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1.15.01.18.02	√	√	√	√	√	√
10.3	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	1.15.01.18.03	√	√	√	√	√	√
10.4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	1.15.01.18.04	√	√	√	√	√	√
10.5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	1.15.01.18.05	√	√	√	√	√	√
10.6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	1.15.01.18.06	√	√	√	√	√	√
10.7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	1.15.01.18.07	√	√	√	√	√	√
10.8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	1.15.01.18.08	√	√	√	√	√	√
10.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.15.01.18.09	√	√	√	√	√	√
10.10	Direktori Koperasi	1.15.01.18.10	√	√	√	√	√	√
10.11	Bimbingan teknis pelaksanaan RAT	1.15.01.18.11	√	√	√	-	-	-
10.12	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	1.15.01.18.12	-	√	-	-	-	-
10.13	Pelatihan pengawasan Koperasi	1.15.01.18.13	-	√	-	-	-	-
10.14	Penilaian tokoh koperasi dan penghargaan koperasi berprestasi	1.15.01.18.14	-	√	√	-	-	-
10.15	Sosialisasi guna mendorong penumbuhan koperasi dari kel. Strategis di pedesaan	1.15.01.18.15	-	√	-	-	-	-
10.16	Sosialisasi guna mendorong tumbuhnya koperasi dari LKM	1.15.01.18.16	-	√	√	-	-	-
10.17	Sosialisasi pembentukan koperasi skunder	1.15.01.18.17	-	√	-	-	-	-
10.18	Rakor penguatan kelembagaan	1.15.01.18.	-	-	√	-	-	-

6	koperasi	18						
10.1 7	Benah Koperasi tidak aktif	1.15.01.18. 19	-	-	√	-	-	-

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.	Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	1.15.01.19						
Kegiatan :								
11.0 1	Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Investasi Koperasi dengan Usaha Besar	1.15.01.19. 01	√	√	√	√	√	√
11.0 2	Semiloka Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1.15.01.19. 02	√	√	√	√	√	√
11.0 3	Fasilitasi pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal	1.15.01.19. 03	√	√	√	√	√	√
11.0 4	Pembinaan Sentra-Sentra Produksi UMKM di Daerah Tertinggal/Terisolir	1.15.01.19. 04	√	√	√	√	√	√

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Lintas Sektor, Lembaga dan Wilayah	1.15.01.20						
Kegiatan :								
12.0 1	Rapat Koordinasi Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan	1.15.01.20. 01	√	√	√	√	√	√
12.0 2	Pembentukan Tim Pengawasan Koperasi	1.15.01.20. 02	√	√	√	√	√	√
12.0 3	Rapat Pokja Penyelesaian Penyimpangan/Penyalahgunaan Prinsip-Prinsip Koperasi	1.15.01.20. 03	√	√	√	√	√	√
12.0 4	Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar	1.15.01.20. 04	√	√	√	√	√	√
12.0	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Lintas Instansi,	1.15.01.20.	√	√	√	√	√	√

5	Wilayah dan lembaga	05						
---	---------------------	----	--	--	--	--	--	--

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	Dilaksanakan Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
13.	Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	1.15.01.21						
Kegiatan :								
13.0 1	Diklat Manajemen Usaha koperasi Nelayan/perikanan	1.15.01.21. 01	√	√	√	√	√	√
13.0 2	Diklat Manajemen Usaha Retail Koperasi	1.15.01.21. 02	√	√	√	√	√	√
13.0 3	Diklat Koperasi Simpan pinjam Pola syariah	1.15.01.21. 03	√	√	√	√	√	√
13.0 4	Bintek SOP Koperasi Jasa Keuangan	1.15.01.21. 04	√	√	√	√	√	√
13.0 5	Bintek SOP Koperasi Wisata	1.15.01.21. 05	√	√	√	√	√	√
13.0 6	Diklat Pengawas Koperasi	1.15.01.21. 06	√	√	√	√	√	√
13.0 7	Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggung Jawaban RAT	1.15.01.21. 07	√	√	√	√	√	√
13.0 8	Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM	1.15.01.21. 08	√	√	√	√	√	√
13.0 9	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan Inovator	1.15.01.21. 09	√	√	√	√	√	√
13.1 0	Pelatihan Informasi dan teknologi (IT)	1.15.01.21. 10	√	√	√	√	√	√
13.1 1	Temu Mitra UMKM	1.15.01.21. 11						
13.1 2	Konsolidasi Konsultan Bisnis	1.15.01.21. 12	—	—	√	—	—	—
13.1 3	Fasilitas Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan Melalui Lembaga Koperasi Berbasis OVOP	1.15.01.21. 13	—	—	√	—	—	—
13.1 4	Pembinaan Sentra-sentra Produksi UMKM di Daerah	1.15.01.21. 14	—	—	√	—	—	—

	Tertinggal/ Terisolir							
13.1 5	Peningkatan Akses dan Perluas Pasar Ekspor bagi Produk UMKM	1.15.01.21. 15	-	-	√	-	-	-
13.1 6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	1.15.01.21. 16	-	-	√	-	-	-
13.1 7	Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Menyerap Tenaga Kerja	1.15.01.21. 17	-	-	√	-	-	-
13.1 8	Pelatihan Informasi dan Teknologi	1.15.01.21. 18	-	-	√	-	-	-
13.1 9	Diklat manajemen pengelola koperasi di Prov. Kep. Bangka Belitung (1903)	1.15.01.21. 19	-	-	√	-	-	-
13.2 0	Diklat laporan keuangan bagi koperasi sektor pertanian/ perkebunan di Prov. Kep. Bangka Belitung (1902)	1.15.01.21. 20	-	-	√	-	-	-
13.2 1	Diklat perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/ perkebunan (1617)	1.15.01.21. 21	-	-	√	-	-	-
13.2 2	Bimtek penilaian kesehatan KSP	1.15.01.21. 22	-	-	√	-	-	-

5.2 PENDANAAN

Secara terinci pendanaan program dan kegiatan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Program/Kegiatan	Kode Program / Kegiatan	PENDANAAN					TOTAL
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.15.01.01	1.316.400.000	1.667.320.000	2.157.000.000	2.440.000.000	2.745.000.000	10.325.720.000
Kegiatan :								
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.15.01.01.01	181.050.000	25.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	326.050.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.15.01.01.02	48.000.000	219.600.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	867.600.000
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.15.01.01.07	59.520.000	117.420.000	125.000.000	135.000.000	140.000.000	576.940.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	1.15.01.01.08	82.200.000	164.400.000	180.000.000	240.000.000	280.000.000	946.600.000
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.15.01.01.10	480.630.000	300.000.000	527.000.000	550.000.000	580.000.000	2.437.630.000
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.15.01.01.11	70.000.000	75.000.000	115.000.000	140.000.000	185.000.000	585.000.000
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1.15.01.01.15	15.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	90.000.000	245.000.000
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.15.01.01.17	30.000.000	30.000.000	75.000.000	90.000.000	125.000.000	350.000.000
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.15.01.01.18	350.000.000	400.000.000	500.000.000	575.000.000	650.000.000	2.475.000.000
1.10	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	1.15.01.01.19	-	315.900.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	1.515.900.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.15.01.02	351.920.000	3.595.000.000	7.595.000.000	485.000.000	510.000.000	12.536.920.000
Kegiatan :								
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	1.15.01.02.03	-	1.484.640.000	7.000.000.000	-	-	8.484.640.000
2.2	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1.15.01.02.05	-	295.300.000	-	-	-	295.300.000
2.3	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1.15.01.02.07	99.000.000	784.780.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	1.083.780.000
2.4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.15.01.02.09	-	355.550.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	555.550.000
2.5	Pengadaan Meubeleur	1.15.01.02.10	52.350.000	445.200.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	697.550.000
2.6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.15.01.02.24	180.570.000	204.530.000	255.000.000	290.000.000	310.000.000	1.240.100.000
2.7	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.15.01.02.28	20.000.000	25.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	180.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga dan produk kumkm	1. Bertambahnya Koperasi 105 Unit dan 17.500 Unit UMKM 2. Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas 3. Bertambahnya Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional; 4. Persentase Pelaksanaan Rat Koperasi; 5. Bertambahnya Koperasi Skala Besar 6. Persentase Koperasi Aktif 7. Bertambahnya Ragam Kemasan Kumkm 8. Diterbitkannya Sertifikat Halal Untuk Umkm; 9. Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil 10. Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah 11. Terpilihnya UMKM Berprestasi Nasional;	105 Kop / 17.500 UMKM 166 Kop 5 Kop 3 Unit 3 Unit 9 Jenis 50 UMKM 1260 Unit 40 Unit Usaha; 5 UMKM	21 kop / 3500 UMKM 33 kop 1 57% 83% 4 Jenis 20 UMKM 252 Unit 8 1	21 kop / 3500 UMKM 33 kop 1 57% 84% 5 Jenis 20 UMKM 252 Unit 8 1	21 kop / 3500 UMKM 33 kop 1 58% 85% 5 Jenis 10 UMKM 252 Unit 8 1	21 kop / 3500 UMKM 33 kop 1 59% 86% 5 Jenis 10 UMKM 252 Unit 8 1	21 kop / 3500 UMKM 34 kop 1 60% 87% 5 Jenis 10 UMKM 252 Unit 8 1	105 Kop / 17.500 UMKM 166 Kop 5 Kop 3 Unit 3 Unit 9 Jenis 50 UMKM 1260 Unit 40 Unit Usaha; 5 UMKM
2	Peningkatan kekuatan modal kumkm dan volume usaha	12. Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi ; 13. Persentase Tersalurkannya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM Ditahun Kelima Dari Total Kredit Yang Disalurkan; 14. PT. Jamkrida Babel Menjamin KUMKM ; 15. Tersalurkannya Kredit Perbankan Kepada Kumkm, Dana Bum/Csr , Dana Bantuan Hibah Pemerintah , Tersalurkannya Dana LPDR Sebesar : 16. Bertambahnya Volume Usaha Koperasi ; 17. Bertambahnya Volume Usaha UMKM	Rp. 70 Milyar 57% 850 Unit Rp. 2,7 Trilyun, Rp. 26 Milyar, Rp. 80 Milyar, Rp. 2 Milyar Rp. 700 Milyar Rp. 10 Trilyun .	66 M 53% 212 Rp. 2,3 Trilyun, Rp. 22 Milyar, Rp. 76 Milyar, Rp. 1.6 Milyar 660 M 6 T	67 M 54% 212 Rp. 2,4 Trilyun, Rp. 23 Milyar, Rp. 77 Milyar, Rp. 1.7 Milyar 670 M 7 T	68 M 55% 212 Rp. 2,5 Trilyun, Rp. 24 Milyar, Rp. 78 Milyar, Rp. 1.8 Milyar 680 M 8 T	69 M 56% 214 Rp. 2,6 Trilyun, Rp. 25 Milyar, Rp. 79 Milyar, Rp. 1.9 Milyar 690 M 9 T	70 M 57% 214 Rp. 2,7 Trilyun, Rp. 26 Milyar, Rp. 80 Milyar, Rp. 2 Milyar 700 M 10 T	Rp. 70 Milyar 57% 850 Unit Rp. 2,7 Trilyun, Rp. 26 Milyar, Rp. 80 Milyar, Rp. 2 Milyar Rp. 700 Milyar Rp. 10 Trilyun .

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	Meningkatkan peran kumkm mengembangkan ekonomi daerah melalui potensi wilayah (ovop)	18. Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh Koperasi Dan UMKM ;	1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang;	200 Orang Dan UMKM 21.000 Orang;	200 Orang Dan UMKM 21.000 Orang;	200 Orang Dan UMKM 21.000 Orang;	200 Orang Dan UMKM 21.000 Orang;	200 Orang Dan UMKM 21.000 Orang;	1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang;
		19. Pembangunan Pasar Tradisional Yang Tersebar Di 7 Kab/Kota;	21 Unit	4	4	4	4	1	21 Unit
		20. Terwujudnya Yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau;	125 Kumkm	5	5	5	5	5	125 Kumkm
4	Meningkatkan konektivitas dan sinergitas pemberdayaan kumkm dengan pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota), swasta, bumh dan masyarakat	21. Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan , Perkebunan , Pariwisata , Perdagangan, Pangan	10%, 20%, 5%, 30%, 25%.	2%, 4%, 1%, 6%, 5%.	2%, 4%, 1%, 6%, 5%.	2%, 4%, 1%, 6%, 5%.	2%, 4%, 1%, 6%, 5%.	2%, 4%, 1%, 6%, 5%.	10%, 20%, 5%, 30%, 25%.
		22. Terlaksananya 30 Kali Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, 20 Kali Dengan Instansi Provinsi, 20 Kali Dengan Dinas Kab/Kota Dan 50 Kali Dengan Lintas Lembaga;							
		23. Terwujudnya Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjaminan Kredit, BUMN;	6 (Enam) Bank, 1 (Satu) Lembaga Penjaminan Kredit, 14 (Empat Belas) BUMN;						6 (Enam) Bank, 1 (Satu) Lembaga Penjaminan Kredit, 14 (Empat Belas) BUMN;
		24. Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum ;	15 Kali	3	3	3	3	3	15 Kali
5	Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkeoperasi di tengah masyarakat	25. Terwujudnya Koordinasi Dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif Di 7 Kab/Kota	7 Tim	2	2	2	1	7 Tim	
		26. Terbentuknya Tim Pengawasan Koperasi dan Pokja Pengawasan Koperasi	8 (Delapan) Tim Pengawasan Koperasi, 1 (Satu) Pokja Pengawasan	8	-	-	-	-	-

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6	Meningkatkan jumlah dan kualitas sdm aparatur maupun sdm kumkm	27. Bertambahnya SDM Pembina	60 Pegawai;	12	12	12	12	12	60 Pegawai;
		28. Terlatihnya SDM Pembina	60 Pegawai;	12	12	12	12	12	60 Pegawai;
		29. Bertambahnya SDM Koperasi Dan SDM KUMKM ;	SDM Koperasi 1.000 Orang Dan SDM KUMKM 17.500 Orang	SDM Koperasi 200 Orang Dan SDM KUMKM 3.500 Orang	SDM Koperasi 200 Orang Dan SDM KUMKM 3.500 Orang	SDM Koperasi 200 Orang Dan SDM KUMKM 3.500 Orang	SDM Koperasi 200 Orang Dan SDM KUMKM 3.500 Orang	SDM Koperasi 200 Orang Dan SDM KUMKM 3.500 Orang	SDM Koperasi 1.000 Orang Dan SDM KUMKM 17.500 Orang
		30. Terlatihnya SDM Koperasi Dan SDM KUMKM	2.000 Orang Dan SDM KUMKM 1.250 Orang	400 Org dan 250 UMKM	400 Org dan 250 UMKM	400 Org dan 250 UMKM	400 Org dan 250 UMKM	400 Org dan 250 UMKM	2.000 Orang Dan SDM KUMKM 1.250 Orang
7	Membangun infrastruktur balai latihan kumkm dan pusat promosi/ bisnis kumkm dan kantor dinas kumkm serta kualitas data base	31. Terwujudnya Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi Dan UMKM	8 Unit		2	2	2	2	8 Unit
		32. Bertambahnya Penyuluh Dan Pencacah Data Koperasi Dan UMKM	25 Orang	5	5	5	5	5	25 Orang
		33. Terwujudnya Pembangunan Kantor Dinas, Balatkop Dan UMKM Serta Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM	1 Unit Kantor Dinas, 1 Unit Balatkop Dan UMKM Serta 1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM	1 Unit Balatkop Dan UMKM		1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM		1 Unit Kantor Dinas	1 Unit Kantor Dinas, 1 Unit Balatkop Dan UMKM Serta 1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM